



Wako Apresiasi Seluruh Jajaran

■ Pontianak Raih Opini WTP ke-14

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini merupakan yang ke-14 kalinya secara berturut-turut, diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Senin 26 Mei 2025.



Ini adalah hasil komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Namun, mempertahankan WTP bukan hal mudah. Dibutuhkan kerja sama, konsistensi, dan koordinasi lintas instansi

Edi Rusdi Kamtono
Wali Kota Pontianak

Rusdi Kamtono, menyampaikan apresiasinya atas kerja seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

"Ini adalah hasil komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Namun, mempertahankan WTP bukan hal mudah. Dibutuhkan kerja sama, konsistensi, dan koordinasi lintas instansi," ujarnya usai menerima LHP di Aula BPK Kalbar.

Meski berhasil meraih predikat tertinggi, Edi mengakui masih terdapat catatan yang perlu ditindaklanjuti, seperti pengelolaan aset, peningkatan SAP, serta pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan laporan keuangan sebagai dasar dalam pelaksanaan program prioritas sesuai RPJMD.

Senada, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, turut mengapresiasi pencapaian ini dan menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung perbaikan pengelolaan keuangan, khususnya dalam optimalisasi pendapatan dari sektor retribusi.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Sri Haryati menerangkan, 13 dari 14 pemerintah daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan satu pemerintah daerah berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ia menilai, pemerintah daerah yang meraih WTP dinilai telah menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berdampak material, serta memiliki sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai.

"Pemeriksaan kami menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel," ungkap.

BPK juga menyoroti sejumlah permasalahan yang masih menjadi perhatian, antara lain Pendapatan Daerah, meliputi pengelolaan potensi dari tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi pemanfaatan aset daerah yang belum optimal.

Kemudian belanja daerah, termasuk pembayaran gaji dan honorarium, kekurangan volume pekerjaan, serta belanja bahan bakar dan perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan.

"Pengelolaan aset, khususnya dalam penatausahaan piutang PBB-P2, pengamanan aset tetap, serta pengelolaan persediaan," terangnya.

Sri Haryati menegaskan pentingnya tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Ia meminta agar seluruh pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan dalam waktu 60 hari sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

"Kami harap pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi demi perbaikan pengelolaan keuangan yang lebih baik," tutupnya.

Sri juga mengimbau agar seluruh pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sesuai amanat undang-undang. **(mas)**



IST/PROKOPIM

PENYERAHAN - Kepala BPK Kalbar, Sri Haryati, menyerahkan LHP LKPD Tahun 2024 kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdji Kamtono, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian menerima LHP di Aula BPK Kalbar Senin 26 Mei 2025.